

# Usut Tuntas Korupsi di Basarnas

**K**ISRUH penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan sejumlah orang lain oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pengadaan barang Basarnas menjadi isu hangat yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Dalam kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK itu, dua perwira TNI yakni Henri selaku Kabasarnas dan Afri selaku Koorsmin Kabasarnas sempat diumumkan lembaga antirasuah sebagai tersangka.

Henri melalui Afri Budi diduga menerima suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2023 sejumlah sekitar Rp 999,7 juta dari berbagai vendor pemenang proyek dan proses lelang telah diatur untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Dalam berbagai pertemuan diduga ada terjadi deal pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak, fakta ini menggambarkan sistem apapun yang dibangun, ketika terjadi persekongkolan pasti akan kebolan.

Terlepas dari kisruh permintaan maaf pimpinan KPK



**Ade Mahmud**

Dosen Fakultas Hukum Unisba

atas adanya kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penetapan tersangka, proses hukum atas dugaan korupsi pengadaan barang di Basarnas harus diusut tuntas tanpa pandang bulu karena penegakan hukum mesti berpijak pada prinsip *equality before the law* yang menuntut kesamaan posisi setiap orang dihadapan hukum.

Jangan sampai karena ada kisruh salah prosedur dan permohonan maaf, membuat penanganan kasus ini menjadi kendor. Lantas, bagaimana hukum mengatur penanganan perkara korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer.

KPK sebagai lembaga penegak hukum memiliki mekanisme hukum acara yang wajib dipatuhi dalam hal ini apabila KPK melaksanakan pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer maka harus dikoordinasikan dengan Puspom TNI.

Pengoordinasian ini harus dilakukan sejak tahap awal penyelidikan. Artinya, jika berdasarkan laporan masyarakat dan bukti menunjukkan ada keterlibatan anggota TNI aktif maka kondisi tersebut langsung disampaikan kepada pihak militer agar langsung dapat bekerja sama mengungkap dugaan kasus tersebut.

Kasus korupsi pengadaan barang di Basarnas adalah hasil dari OTT tim KPK yang dilakukan jauh-jauh hari. Artinya, sebelum dilakukan penangkapan tim sudah mengumpulkan berbagai bukti elektronik dan mencatat siapa saja pihak-pihak yang terlibat, berapa nilai uang yang akan diserahkan, kapan dan di mana lokasi penyerahan uang akan dilaksanakan.

Seluruh informasi tersebut pasti diverifikasi dan divalidasi lebih dulu sebelum melakukan tangkap tangan sehingga pada tahap ini tim KPK pasti sudah menyampaikannya ke atasan dan su-

atu yang aneh jika pimpinannya tidak mengetahui bahwa dalam operasi itu ada pihak militer yang ikut terjaring.

Deteksi adanya anggota TNI yang ikut terjaring OTT mestinya juga terungkap dalam ekspose perkara yang dihadiri penyidik, penyidik, penuntut umum, dan pimpinan. Dengan demikian, sebelum diumumkan ke masyarakat, KPK dapat berkoordinasi langsung dengan Puspom TNI untuk penanganan lebih lanjut.

## Jalan keluar

Hukum acara pidana memberikan solusi atas kemelut yang timbul dari adanya kesalahan prosedur penetapan tersangka anggota TNI aktif melalui mekanisme koneksi, cara ini dilaksanakan dengan membentuk tim yang terdiri dari penyidik dan polisi militer sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menentukan apakah pengadilan umum atau pengadilan militer yang akan mengadili perkara tersebut, tim koneksi wajib melakukan penelitian dan pendalaman bersama yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada atasan masing-masing.

Penentuan pengadilan mana yang akan mengadili kasus ini ditentukan dari titik berat kerugian yang ditemukan oleh tim koneksi.

Dalam kasus korupsi Basarnas ini secara teknis penyidikan, KPK tinggal menyerahkan dua tersangka dan barang buktinya kepada Puspom untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan militer.

Berbekal bukti-bukti hasil OTT pihak TNI dapat melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan tidak perlu terlalu repot mengungkap kasus ini dari awal karena bukti permulaan sudah ada.

Sebaliknya, KPK dapat melanjutkan penyidikan terhadap pihak swasta pemberi suap sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai ke tahap pengadilan.

KPK juga telah memiliki pengalaman menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama anggota militer dalam kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa KPK dapat menumpas korupsi yang ada di tubuh militer melalui kerja sama dan koordinasi yang baik.\*\*